

VISA UMRAH JEMAAH INDONESIA

Tetap Gunakan Skema B to B

**JEDDAH (KR)** - Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Nasrullah Jasam menegaskan, proses penerbitan visa umrah jemaah Indonesia masih menggunakan skema Business to Business (B to B).

Pihaknya sudah memastikan hal itu dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Jeddah, baru-baru ini.

Hadir dalam pertemuan itu, Deputy Kementerian Haji dan Umrah Bidang Umrah Abdul Aziz Wazzan, Direktur Administrasi Layanan Jemaah Umrah Misy'al, Administrasi Layanan Jemaah Umrah Samiah dan Kepala Kantor Deputy Kementerian Haji dan Umrah Bidang Umrah

Aiman. Dari Kantor Urusan Haji, hadir Pembantu Staf Teknis Haji 2 (PSTH 2) Muhammad Luthfi Makki dan Sekretariat Teknis Urusan Haji Asmoni Abdurrahman.

"Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait dengan penerbitan visa umrah bagi jemaah umrah dari Indonesia masih tetap B to B," tegas Nasrullah di Jeddah, Kamis (22/9).

Selain itu, seluruh jemaah umrah harus sudah divaksin Covid-19 sebanyak



**KUNJUNGAN WAPRES: Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin (kiri) disambut Ketua Baznas RI sekaligus Ketua Yayasan Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Prof Dr KH Noor Achmad MA, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, dan Wakil Walikota Semarang Ir Hj Hevearita G Rahayu MSos sebelum meresmikan Gedung Fakultas Farmasi, Rumah Sakit, dan Sport Centre Unwahas di Kampus Gunungpati, Semarang, Jateng, Kamis (22/9). Jumat (23/9) hari ini Wapres juga meresmikan hasil pembangunan dan penataan Masjid Raya Baiturrahman serta Gedung Kantor Majelis Ulama Jateng di kompleks Masjid Raya Baiturrahman.**

Desa Prener Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa



Evaluasi Pelaksanaan Desa Prener Model K45PAK oleh Para Ahli dan Tim Pendamping Pemberdayaan Desa

**YOGYA (KR)** - Skema pelaksanaan pemberdayaan kewirausahaan desa melalui program desa prener dengan pendekatan Kiblat Papat Lima Pancer Adiluhung Kawentar (K45PAK) sudah berjalan hampir tiga tahun. Konsep desa prener dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pengembangan dinamika entrepreneurship dan membantu pengentasan kemiskinan. Serta mengurangi pengangguran melalui pengembangan kapasitas masyarakat berkelanjutan.

Salah satu model desa prener yang dikembangkan adalah K45PAK. Ini merupakan model pemberdayaan masyarakat (community development) yang merupakan pancer atau pusat dan berfungsi sebagai etalase dan inkubator bisnis berkiblat atau berpedoman pada 4 hal. Yaitu global value (kiblat 1), local wisdom (kiblat 2), local supply chain (kiblat 3) dan global marketing (kiblat 4).

Secara visual dapat digambarkan bahwa pancer menyatu dan dikelilingi 4 kiblat. Artinya bahwa keempat kiblat atau pedoman tersebut menyatu dan menjiwai pancer yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa. Untuk itu, evaluasi pelaksanaan desa prener model K45PAK dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan program tersebut dalam mendukung penciptaan wirausaha baru.

Evaluasi dilaksanakan mengundang seluruh perwakilan kelompok dan perangkat desa yang menjadi binaan desa prener model K45PAK. Sekurangnya terdapat enam belas kelurahan yang dialami capaian proses pelatihan dan pendampingannya. Diskusi mengenai evaluasi capaian desa prener ini melibatkan para ahli dan praktisi pendampingan masyarakat. Diantaranya Dr Duddy Roesmara Donna selaku konseptor K45PAK, Cecep Ernanto selaku Koordinator Pendampingan Wirasika Holistika, Imam Syafii selaku konseptor pendampingan model Blangkon, dan Dewi Filliana selaku Direktur Jiwa Baku-lan.

Dalam sambutan pembukaan kegiatan evaluasi yang diadakan di Hotel Ibis Style, Kamis (22/9) Wisnu Hermawan SP MT, selaku Kabid Layanan Kewirausahaan KUKM Dinas Koperasi UKM DIY mengatakan bahwa evaluasi desa prener penting dilakukan agar status desa prener yang disandang bisa diketahui memiliki kemajuan atau sebaliknya.

"Beberapa fakta di lapangan bisa dialami bahwa tidak dipungkiri terdapat sejumlah hambatan pengembangan, seperti tingkat ketahanan pelaku usaha dalam pengembangan bisnis hingga problem konflik internal dalam kelompok," ujar Wisnu.

Meski demikian, hal yang patut diapresiasi dalam pengembangan desa prener model K45PAK adalah munculnya produk-produk unggulan desa yang berkualitas. Bahkan sosialisasi SIBAKUL dan pendataan NIB menjadi sangat terbantu melalui skema pendampingan desa prener ini.

Sementara, Duddy Roesmara Donna menambahkan pelaksanaan skema desa prener model K45PAK ini harus berdampak pada tumbuhnya wirausaha baru, mendorong perekonomian lokal tumbuh, menekan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. "Ini adalah kontrak tim pendamping K45PAK kepada Dinas Koperasi UKM DIY. Maka, kami akan benar-benar selektif dalam memberikan penilaian desa mana saja yang layak pada tahapan berikutnya dan desa mana saja yang harus bertahan," papar Duddy. (Sal)

INFLASI TINGGI JADI MOMOK PEMULIHAN EKONOMI

Rakorda TPID Se-DIY Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Dan Ketahanan Pangan

**SLEMAN (KR)** - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY bertema 'Sinergi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan' di Royal Ambarukmo Yogyakarta, Kamis (22/9). Rakorda TPID se-DIY ini dalam rangka memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana arahan Presiden RI.

Rakorda TPID se-DIY tersebut dihadiri Wakil Gubernur DIY Paku Alam X, Kepala Badan Pangan Nasional RI Arief Prasetyo Adi, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi, Bupati/Walikota se-DIY, kepala dinas dan anggota TPID se-DIY, perwakilan akademisi, serta stakeholders terkait.

Sebagaimana roadmap TPID DIY 2022-2024 sesuai dengan arahan Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), salah satu sorotan utama dalam kerangka jalan tersebut adalah mengenai pentingnya stabilitas harga dan ketahanan pangan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan kondisi global, nasional dan DIY di mana inflasi yang tinggi kian menjadi momok di tengah pemulihan ekonomi.

Wagub DIY Paku Alam X membacakan sambutan Gubernur DIY, menyatakan capaian inflasi DIY terbilang cukup tinggi sebesar 5,52 % (yoy) pada Agustus 2022, angka inflasi ini berada di luar sasaran target pengendalian inflasi dan menjadi peringatan tersendiri dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di DIY. Tantangan pengendalian inflasi ke depan juga terbilang berat, khususnya akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi, Elpiji, tarif listrik serta bahan baku produksi di tengah permintaan masyarakat.

"Berkenaan dengan semua itu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan arahan agar tetap menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan. Pemda DIY sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan TPID hingga sampai saat ini DIY termasuk dalam daerah yang cukup baik dalam penanganan inflasi. Terindikasi TPID DIY termasuk dalam nominasi peraih TPID Award 2022 setelah sebelumnya menjadi TPID Terbaik se-Jawa. Kami mengharapkan langkah ini ke depan dapat diimplementasikan dan diikuti pada level Kabupaten dan Kota," terangnya.

Kepala Perwakilan BI DIY Budiharto Setyawan menyebut inflasi kian meningkat, berbeda dengan kondisi pandemi dua tahun yang lalu. Adapun hingga Agustus 2022 ini, inflasi DIY tercatat telah tumbuh 5,52% (yoy), angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian nasional 4,69% (yoy). BI menilai kondisi tersebut mengindikasikan tantangan pengendalian inflasi ke depan yang tidak akan mudah.

"Setidaknya terdapat 3 tantangan besar kedepan, Pertama, disrupsi dari sisi penawaran baik secara global maupun lokal (supply shock) akibat pandemi. Kondisi pembatasan mobilitas yang berlangsung selama dua tahun lebih masih menyisakan hambatan atau disrupsi pada sisi penawaran. Di sisi lain, permintaan kian menunjukkan perbaikan sejalan dengan pulihnya geliat ekonomi. Alhasil terjadi ketidak-



Wagub DIY Paku Alam X menerima Piagam Nominasi Peraih TPID Award 2022 yang diserahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi

sepadanan atau mismatch di mana sisi penawaran tidak dapat merespon kenaikan permintaan secara cepat," tuturnya.

Kedua, disampaikan Budiharto adalah isu ketahanan pangan, baik secara nasional maupun lokal DIY. Penawaran pangan yang kian terbatas juga diperparah dengan ketegangan politik Rusia-Ukraina yang merupakan negara produsen gandum dunia, serta kebijakan proteksionisme pangan beberapa negara. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam pemenuhan komoditas pangan impor nasional. Jika ditinjau lagi, DIY juga masih bergantung terhadap daerah lain dalam pemenuhan beberapa komoditas pangan. Oleh karena itu, perlu perhatian dan upaya luar biasa (extra effort) dari TPID dalam mewujudkan ketahanan pangan DIY.

"Ketiga, kendala dari sisi produksi dan distribusi, khususnya akibat faktor cuaca yang tidak menentu. Gangguan cuaca seperti La Nina dan banjir masih menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi. Belum lekang dari ingatan kita mengenai kenaikan harga cabai pada awal hingga pertengahan Triwulan III lalu akibat faktor cuaca yang menyebabkan kegagalan panen dan rentannya serangan hama," imbuhnya.

Berkaca dari tiga hal tersebut, Budiharto menekankan penting bagi TPID untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. BI DIY juga sangat mengapresiasi komitmen dari Pemda DIY melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemda DIY dan Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta tentang Pengelolaan Pangan yang Terintegrasi di Wilayah DIY.

Tidak hanya itu, DIY juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2022 pada 16 Agustus 2022 lalu. TPID menindaklanjutinya melalui program Pasar Murah di 8 titik, pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah (KAD) komoditas cabai, penyerahan 4.000 bibit cabai kepada 22 pesantren, serta inisiasi Pertanian Terpadu Urban Farming Kota Yogyakarta. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut akan terus dilakukan dan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan Rakorda TPID se-DIY kali ini juga diselenggarakan penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta terkait Fasilitas Pembuatan Pupuk Sampah Organik dalam rangka Pertanian Terpadu Urban Farming Kota Yogyakarta. Diharapkan langkah-langkah yang sudah dilakukan TPID DIY dan sinergi antar lembaga yang sudah terjalin dengan sangat baik dapat semakin memantapkan upaya peningkatan ketahanan pangan DIY, serta mendorong akselerasi pemulihan ekonomi DIY. (Ira)



Pembukaan Rakorda TPID se-DIY di Royal Ambarukmo Yogyakarta, Kamis (22/9)